

**ANALISIS KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI  
RUMAH TANGGA NELAYAN MISKIN  
(KASUS KELURAHAN MATTIRO SOMPE KECAMATAN LIUKANG  
TUPABIRING KABUPATEN PANGKEP)**

**ANALYSIS ECONOMIC AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF  
POOR FISHERMAN HOUSEHOLD  
(A CASE STUDY OF MATTIRO SOMPE DISTRICT ADMINISTERED,  
LIUKANG TUPABIRING SUBDISTRICT)**



**NUR RAHMAN AKSAD  
PO700204005**

**EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASAR  
2008**

**ANALISIS KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI  
RUMAH TANGGA NELAYAN MISKIN  
(KASUS KELURAHAN MATTIRO SOMPE KECAMATAN LIUKANG  
TUPABIRING KABUPATEN PANGKEP)**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan

Disusun dan diajukan oleh

NUR RAHMAN AKSAD

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASAR  
2008**

**ANALISIS KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI  
RUMAH TANGGA NELAYAN MISKIN  
(KASUS KELURAHAN MATTIRO SOMPE KECAMATAN LIUKANG  
TUPABIRING KABUPATEN PANGKEP)**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister**

**Program Studi  
EKONOMI PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**Disusun dan diajukan oleh**

**NUR RAHMAN AKSAD**

**Kepada**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2008**

# TE S I S

## **ANALISIS KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA NELAYAN MISKIN (KASUS KELURAHAN MATTIRO SOMPE KECAMATAN LIUKANG TUPABIRING KABUPATEN PANGKEP)**

Disusun dan diajukan oleh

**NUR RAHMAN AKSAD**

Nomor Pokok PO700204005

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 29 Juli 2008

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

**Komisi Penasehat**

Prof. Dr. I Made Benyamin, M.Ec

Ketua

Ketua Program Studi  
Ekonomi Perencanaan Pembangunan

Dr. H. Madris, M.Si

Anggota

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Rahmatiah, MA

Prof. Dr. dr. Razak Thaha, M.Sc

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Rahman Aksad

Nomor Pokok : P0700204005

Program Studi : Ekonomi Perencanaan Pembangunan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Juli 2008

Yang menyatakan

**( Nur Rahman Aksad )**  
**P0700204005**

## ABSTRAK

**Nur Rahman Aksad.** Analisis karakteristik sosial ekonomi rumah tangga nelayan miskin (kasus Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep) (bimbingan oleh **I Made Benyamin**, dan **Madris**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi meliputi: umur, pendidikan, kelembagaan, makna hidup, waktu kerja, pengeluaran konsumsi, dan tabungan serta hubungannya dengan pendapatan rumah tangga nelayan miskin di Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep.

Lokasi penelitian dilakukan di dua pulau dalam daerah administratif Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep. Jumlah sampel 109 orang dari 724 populasi rumah tangga nelayan miskin dengan teknik *accidental sampling*.

Metode analisis yang digunakan terdiri *Chi-square*, koefisien kontinensi dan tabel kontinensi masing-masing untuk melihat signifikansi, keeratan hubungan dan bentuk hubungan variabel yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tujuh variabel yang diteliti lima variabel yang signifikan yaitu umur, pendidikan, waktu kerja, pengeluaran, dan konsumsi. Keeratan hubungan relatif kecil dan bentuk hubungan positif. Variabel yang tidak signifikan keaktifan berlembaga dan kondisi kehidupan, hal ini sesuai dengan landasan teoritis.

## ABSTRACT

Nur Rahman Aksad. Analysis economic and social characteristics of poor fisherman household (a case study of Mattiro Sompe District Administered, Liukang Tupabiring Subdistrict, Pangkep Regency)(Counselor by I Made Benyamin, and Madris)

This researcher is aim to know economic and social characteristics, such as age, education, tenderness, ideology, work time, out come, and saving and then the relation of income of poor fisherman household of Mattiro Sompe District Administered, Liukang Tupabbiring Subdistrict, Pangkep Regency.

Researching was done on two different islands in local administration of Mattiro Sompe District Administered, Liukang Tupabbiring Subdistrict, Pangkep Regency. The numbers of sample are 109 people from 724 population of poor fisherman household with *accidental sampling* technique.

The analysis method was used consist of chi-square, continence coefficient and continence list each them to saw significances of close relationships and variables form which investigating.

Researching result shown that from seven variables was investigating, five variables were significant, they are: age, education, work time, out come, and consumed. Closed relationships were small relative and positive relationships form. The variables which were not significant are ideology and tenderness. Because they are not suitable with term of preferences.

## **PRAKATA**

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Namun, sebagai manusia biasa penulis tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Penulis telah berusaha dengan segala daya dan pikiran tetapi mungkin masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ditemui, baik dari segi bahasa maupun teknis penulisan. Karenanya dengan senang hati penulis mengharapkan saran dan kritikan semua pihak untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang dimaksud.

Dalam penulisan tesis ini mulai dari penelitian sampai penyusunan, berbagai hambatan yang dihadapi, namun atas dorongan dan bimbingan dari semua pihak baik moril maupun material sehingga hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik. Karena itu, pada tempatnyalah penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak. Prof. Dr. I Made Benyamin, M.Ec selaku ketua komisi penasehat dan Dr. H. Madris, DPS, M.Si sebagai anggota komisi penasihat yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Selanjutnya rasa hormat dan terima kasih yang sama tak lupa disampaikan kepada :

1. Bapak Direktur bersama asisten Direktur I, II, dan III serta segenap Civitas Akademika Progam Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.



2. Ibu Dr. Hj. Rahmatia, MA sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Perencanaan Pembangunan serta segenap Dosen dan Staf Tata Usaha Program Ekonomi Perencanaan Pembangunan PPS-Unhas
3. Segenap rekan-rekan mahasiswa seangkatan Program Studi Program Ekonomi Perencanaan Pembangunan Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan, semangat dan dukungannya dalam penyelesaian tesis ini.
4. Serta khusus ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada Ayahanda M. Aksad A, Bsc dan Ibunda Tercinta PUTTIRI yang telah memberikan motivasi.
5. Akhirnya tesis ini penulis persembahkan kepada istri tercinta dan anakda tersayang yang telah banyak memberikan dukungan moril dan material hingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak di atas senantiasa mendapat balasan pahala dari Allah SWT, Amin.

Makassar, 23 Juli 2008

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I INTRODUCTION</b> .....	1
A. Background.....	1
B. Problem statment.....	2
C. Objective of research.....	3
D. Significant of the research.....	3
E. The scope of the research.....	3
<b>BAB II REVIEW OF RELATED LITERATURE</b> .....	4
A. Previous research finding.....	4
B. Review of related literature .....	5
<b>BAB III METHODOLOGY AND PROCEDURE</b> .....	20
A. Method of this research.....	20
B. Population and sample .....	20
C. Procedure of data analysis .....	21
A. Technique of data analysis .....	21
<b>BIBLIOGRAPHY</b> .....	23

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Halaman</b>
1	Peta Kecamatan Liukang Tupabiring	96
2	Angket	97
3	Data hubungan umur dan pendapatan	100
4	Hasil analisis SPSS umur dan pendapatan	101
5	Data hubungan pendidikan dan pendapatan	102
6	Hasil analisis SPSS hubungan pendidikan dan pendapatan	103
7	Hubungan keaktifan berlembaga dan pendapatan	104
8	Hasil analisis SPSS hubungan keaktifan berlembaga dan tabungan	105
9	Data hubungan kondisi kehidupan dan pendapatan	106
10	Hasil analisis SPSS hubungan kondisi kehidupan dan pendapatan	107
11	Data hubungan waktu kerja dan pendapatan	108
12	Hasil analisis SPSS hubungan waktu kerja dan pendapatan	109
13	Data hubungan pendapatan dan konsumsi	110
14	Hasil analisis SPSS hubungan pendapatan dan konsumsi	111
15	Data hubungan pendapatan dan tabungan	112
16	Hasil analisis SPSS hubungan pendapatan dan tabungan	113

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Tabel	Halaman
4.1	Luas daratan pulau Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep	62
4.2	Distribusi persentase penduduk menurut jenis kelamin Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep	64
4.3	Kondisi sarana dan prasarana sosial berdasarkan jenis sarana prasarana Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep	65
4.4	Data jenis pekerjaan perikanan masyarakat Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep	66
4.5	Kalender musiman dan aktivitas kegiatan perikanan penduduk di Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep	67
4.6	Rata-rata dan distribusi persentase responden menurut umur rumah tangga nelayan miskin Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep	68
4.7	Distribusi persentase responden menurut pendidikan formal yang ditamatkan tangga nelayan miskin Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep	69
4.8	Distribusi persentase responden menurut keaktifan berlembaga rumah tangga nelayan miskin Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep	71
4.9	Distribusi persentase responden menurut kondisi kehidupan rumah tangga nelayan miskin Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep	72
4.10	Rata-rata dan distribusi responden menurut waktu kerja perhari rumah tangga nelayan miskin Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep	73

4.11	Rata-rata dan distribusi responden menurut konsumsi per bulan rumah tangga nelayan miskin Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep	74
4.12	Rata-rata dan distribusi responden menurut tabungan per bulan rumah tangga nelayan miskin Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep	75
4.13	Distribusi persentase responden menurut umur dan pen pendapatan rumah tangga nelayan miskin Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep	76
4.14	Distribusi persentase responden menurut pendidikan formal yang ditamatkan dan pendapatan perbulan rumah tangga nelayan miskin Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep	78
4.15	Distribusi persentase responden menurut keaktifan berlembaga dan pendapatan perbulan rumah tangga nelayan miskin Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep	80
4.16	Distribusi persentase responden menurut kondisi kehidupan dan pendapatan perbulan rumah tangga nelayan miskin Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep	81
4.17	Distribusi persentase responden menurut jam kerja per hari dan pendapatan perbulan rumah tangga nelayan miskin Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep	82
4.18	Distribusi persentase responden menurut pendapatan per bulan dan konsumsi per bulan rumah tangga nelayan miskin Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep	83
4.19	Distribusi persentase responden menurut pendapatan per bulan dan tabungan per bulan rumah tangga nelayan miskin Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep	85

4.18	Signifikansi hubungan, keeratan hubungan, dan bentuk hubungan antara karakteristik sosial ekonomi dengan pendapatan rumah tangga rumah tangga nelayan miskin di Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep	86
------	--	----

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Halaman</b>
1	Kerangka Fikir	52
2	Peta Kecamatan Liukang Tupabiring Kab. Pangkep	96

**DAFTAR MASUKAN & PERBAIKAN  
SEMINAR HASIL  
Hari/Tanggal : Senin, agustus 2008**

NO.	Nama	Masukan	Hal	Perbaikan
1.	Dr. Hj. Rahmatia, MA	1. Pada rumusan masalah dituliskan variabel yang akan diteliti  2. Penulisan Tabel huruf besar 3. Penjelasan tabel jangan diakhiri dengan angka	13  66 – 80 66 – 80	1. Untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi meliputi: umur, pendidikan, keaktifan berlembaga, kondisi kehidupan, waktu kerja, konsumsi, dan tabungan rumah tangga nelayan miskin di Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep.  2. Untuk mengetahui hubungan sosial ekonomi meliputi: umur, pendidikan, keaktifan berlembaga, kondisi kehidupan, waktu kerja, konsumsi, dan tabungan dengan pendapatan rumah tangga nelayan miskin di Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep.  Berdasarkan Tabel 4.6  Besarnya persentase responden tamat Sekolah Dasar (SD) disebabkan karena kebiasaan orang tua dulu mempekerjakan anak-anak usia sekolah untuk membantu mereka dalam mencari ikan. Hal lain yang mempengaruhi yaitu belum adanya Sekolah Lanjutan Pertama (SMP) di pulau tersebut pada saat itu.
2.	Dr. Paulus Upun, MA	1. Bab IV dinamisme  2. Ralat teks tidak ada pendidikan (TAP) 3. Kalimat tidak bermoral	62  67 64	masih ada kegiatan masyarakat yang mempercayai dengan membuang sesajen kelaut (cera' liukang) dapat memberikan keselamatan dan meningkatkan hasil tangkapan.  Tidak tamat SD  terakhir, hak pengelolaan dihentikan karena pihak yayasan tidak lagi memperhatikan kondisi pulau tersebut. Informasi pengelolaan pulau tersebut selanjutnya belum ada informasi.



		<p>4. Satuan pada judul kolom tabel</p> <p>5. Penulisan persentase variabel silang berdasarkan kategori variabel bebas</p>	66- 80	<p>Umur (tahun), Pendapatan (Rp 000), Konsumsi (Rp. 000)</p> <p>berdasarkan pernyataan (masri singlaribun 274) bahwa variabel terpengaruh biasanya disusun sebagai baris (vertikal) dan variabel pengaruh di susun sebagai kolom, dalam penelitian ini umur mempengaruhi pendapatan atau <math>y = f(x)</math> dan yang akan dilihat pengaruhnya adalah umur maka, umur yang menjadi 100%.</p> <p>Kondisi kehidupan</p>
		<p>6. Makna hidup</p> <p>7. Kesimpulan</p>	<p>69</p> <p>82</p>	<p>1. Karakteristik rumah tangga nelayan miskin Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep menunjukkan rata-rata umur nelayan 54 tahun, tingkat pendidikan tamatan Sekolah Dasar (SD), tidak aktif berlembaga, kondisi kehidupan cukup baik, waktu kerja 8 sampai 6 jam per hari, konsumsi per bulan Rp. 592.295,00 per bulan dan rata-rata jumlah tabungan Rp. 115.000,00 per bulan.</p> <p>2. Hubungan masing-masing variabel yang dikaji dengan pendapatan rumah tangga nelayan miskin menunjukkan hubungan yang signifikan, tingkat keeratan hubungan yang relatif kecil serta bentuk hubungan positif, kecuali hubungan kelembagaan dan kondisi kehidupan.</p>
3.	DR. Papayungan MA	<p>1. Metode penarikan sampel (accidental sampling)</p> <p>2. Buat analisis pengaruh hubungan nelayan budidaya, penangkap ikan dengan pendapatan</p>	<p>55</p> <p>-</p>	<p>Accidental sampling</p> <p>-</p>
4.	Prof. DR. I Made Benyamin	<p>1. Buat Peta lokasi penelitian</p> <p>2. Buat daftar asset nelayan</p>	<p>88</p> <p>-</p>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Wilayah pesisir memiliki peran ekonomi yang sangat penting, karena memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang sangat besar, jika dikelola dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini antara lain disebabkan oleh kebijakan pembangunan wilayah pesisir yang tidak didasarkan atas potensi sumber daya lokalnya.

Wilayah pesisir memiliki arti penting karena sekitar 60% penduduk Indonesia hidup di wilayah pesisir. Selain itu sebagian besar kota propinsi dan kabupaten terletak di kawasan pesisir. Sektor kelautan memberi kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 20,06% dan industri kelautan menyerap lebih dari 1,16 juta tenaga kerja langsung, (Coremap II Kab. Pangkep, 2005).

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan saat ini mendapat perhatian dengan skala prioritas yang tinggi, serta menjadi bagian dari orientasi kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang telah digulirkan selama ini masih sangat jauh dari yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, kondisi daerah pesisir yang sangat kompleks dalam hal aktifitas

pemanfaatan, masih kurangnya data dasar yang detail tentang kondisi daerah pesisir yang sangat khas dan sangat dinamis.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan selama ini khususnya, yang diarahkan kepada masyarakat, telah membawa perubahan yang cukup mendasar, perubahan yang dimaksud selain dapat merupakan kemajuan (progress) dalam pengertian bahwa pembangunan itu menimbulkan perubahan yang positif juga dapat dipandang dan dirasakan sebagai suatu yang negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam setiap kurung waktu perubahan sosial selalu menarik untuk dikaji dengan berbagai fenomena dan dampaknya, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.

Pengelolaan sumber daya alam di pulau-pulau kecil harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal dan bertanggungjawab yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya dengan tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakat setempat, kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan. Sebagai wilayah yang sangat strategis, wilayah pesisir merupakan suatu zona peruntukan berbagai aktivitas manusia baik sosial, kultur, ekonomi, industri maupun pemanfaatan sumber daya alam secara langsung.

Potensi kelautan dan pesisir baru termanfaatkan sebagian kecil saja, hal ini disebabkan antara lain: (1) Pemerintah dan masyarakat masih mengutamakan eksploitasi daratan, (2) Kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam sektor kelautan relatif masih rendah, khususnya diperikanan

tangkap, (3) Introduksi teknologi baru dalam perikanan tangkap tidak terjangkau oleh nelayan yang kondisi sosial ekonominya rendah, dan (4) Sistem kelembagaan yang ada belum mendukung pada pengembangan sektor kelautan (Budiharsono, 2001).

Kondisi ini juga menyebabkan belum optimalnya tingkat produksi dari setiap unit usaha atau unit penangkapan, terutama nelayan-nelayan skala kecil. Tingkat produksi yang belum optimal disatu sisi dan *cost production* yang tinggi, disisi lain mengakibatkan tingkat pendapatan nelayan menjadi rendah dari profesi yang lain. Kondisi ini dapat dijumpai di berbagai desa nelayan dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Salah satu ciri yang sangat menonjol dari kehidupan nelayan adalah nelayan lebih miskin dari petani, hal ini disebabkan tantangan alam yang dihadapi masyarakat nelayan sangat berat terutama faktor musim, pola kerja yang homogen (hanya satu sumber penghasilan), keterbatasan penguasaan modal (perahu dan alat tangkap), kondisi perumahan dan pemukiman yang tidak memadai, (Raharjo, 1999).

Masyarakat nelayan selama kurang lebih 32 tahun kekuasaan orde baru sangat sedikit mendapat sentuhan kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi. Persoalannya adalah pengambil kebijakan di negeri ini belum memahami secara konprehensif apa sebenarnya akar permasalahan kemiskinan nelayan. Kemiskinan nelayan hanya dipahami sebatas angka-angka statistik yang dikeluarkan oleh BPS yang sifatnya umum.

Dari uraian sebelumnya tampak betapa rapuhnya konsep pembangunan Indonesia. Di satu sisi terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi di sisi lain kesenjangan dan pengangguran juga tetap tinggi. Pembangunan yang berkelanjutan mencakup juga aspek ekonomi dan sosial. Keberlanjutan pembangunan ekonomi berarti tidak ada eksploitasi ekonomi dari pelaku ekonomi yang kuat terhadap yang lemah. Dalam kaitannya maka perlu ada kelembagaan ekonomi yang menyediakan, menampung, dan memberikan akses bagi setiap pelaku. Runtuhnya perekonomian sebagai akibat krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter sejak pertengahan tahun 1997 sampai akhir tahun 1998 yang tertinggal hanya pertumbuhan ekonomi dibawah nol persen, angka pengangguran bertambah, pendapatan nasional riil menurun drastis, penduduk miskin meningkat tajam dan yang lebih buruk lagi adalah terjadinya ketidakstabilan, baik sosial maupun politik yang ditandai dengan hancurnya rezim orde baru.

Konsep pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada pertumbuhan mendapat kritik tajam dari para ahli karena meningkatkan jumlah penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan semakin besar. Pertumbuhan ekonomi saja ternyata tidak mampu menjamin distribusi pendapatan bagi seluruh lapisan masyarakat yang secara hakiki merupakan tujuan pembangunan. Oleh sebab itu, negara-negara berkembang yang memiliki komitmen pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat, harus

berpaling kepada pendekatan pertumbuhan dan pemerataan (*Growth with distributions*) dalam menyusun strategi pembangunan.

Hancurnya perekonomian Indonesia yang mengakhiri rezim orde baru membuktikan bahwa konsep pembangunan yang beorientasi pada pertumbuhan atau produksi saja (*production-centered development*) dan mengabaikan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, ternyata telah gagal. Untuk itu perlu dirumuskan kembali konsep pembangunan yang berorientasi pada manusia (*human-centered development*), yaitu suatu konsep yang mengikutsertakan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat lokal dalam pelaksanaan pembangunan.

Masyarakat lokal adalah pihak yang paling dekat dengan masalah pembangunan yang berkelanjutan. Partisipasi mereka dalam pembangunan adalah sekaligus sebagai subyek dan obyek pembangunan. Walaupun demikian, mereka terlalu sering diperlakukan sebagai pihak yang harus mendengar ketimbang didengar oleh mitra pembangunan lainnya.

Dengan melihat masyarakat lokal sebagai subyek dan objek pembangunan di dalam kesatuan masyarakat nasional dan global, maka definisi tentang pembangunan berkelanjutan masyarakat lokal sebagai berikut: (1) sebuah proses, (2) dimana dalam masyarakat lokal yang bersangkutan sebagai obyek dan subyek pembangunan, terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kesejahteraannya, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pemetikan hasil kegiatannya, (3) dengan menggunakan

sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan sumberdaya kelembagaan yang ada (sosial, ekonomi, kebudayaan), (4) secara terpadu, (5) tanpa menghambat pemenuhan kebutuhan generasi masa depan, (6) menuju ketinggian kemandirian yang lebih tinggi, di dalam suatu masyarakat nasional dan global, (7) dengan atau tanpa bantuan dari luar.

Sebenarnya upaya pemberantasan kemiskinan telah lama menjadi perhatian utama pemerintah orde baru hingga pemerintah sekarang ini. Akan tetapi upaya memberantas kemiskinan tersebut menjadi kurang berhasil atau berdaya guna karena beberapa sebab: pertama, program-program ini direncanakan oleh pemerintah atas dasar persepsi dan asumsi yang keliru terhadap sebab-sebab munculnya kemiskinan. Kedua, perencanaan program anti kemiskinan dilakukan secara uniform baik dari segi bentuk dan model pelaksanaannya tanpa memperhatikan adanya variasi dari berbagai definisi serta sebab terjadinya kemiskinan. Ketiga, lemahnya monitoring dari pemerintah terhadap pelaksanaan program anti kemiskinan yang berakibat terjadinya penyimpangan baik dari segi seleksi penerima program maupun biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan program tersebut. Keempat, kurangnya dukungan penelitian masalah-masalah kemiskinan, dan evaluasi tentang dampak dari program-program anti kemiskinan terhadap perbaikan hidup orang miskin (Soetrisno, 1997).

Pada umumnya kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Kebutuhan yang berhubungan atau digunakan untuk mengukur jumlah kemiskinan adalah dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak, jika tingkat pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum, maka orang atau rumah tangga tersebut dikatakan miskin.

Dengan kata lain, kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum. Kemiskinan dibedakan menjadi dua, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut yang ditetapkan atau dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut. Dengan demikian, tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin dengan tidak miskin, atau sering disebut dengan garis kemiskinan.

Sementara itu, kemiskinan relatif adalah perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yakni antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada garis kemiskinan dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya,



tetapi masih jauh dibandingkan dengan masyarakat disekitarnya, maka orang atau rumah tangga tersebut masih berada dalam keadaan miskin (Hendra, 1986).

Kemiskinan merupakan masalah global, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan dalam berbagai keadaan hidup. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah “negara berkembang” biasanya digunakan untuk merujuk kepada kepada negara-negara yang “miskin”.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, pemahaman utamanya mencakup: (1) Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan sehari-hari seperti: pangan, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar, (2) Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi, (3) gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “ memadai” disini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Pendapat para ahli sosial tentang masalah kemiskinan, khususnya perihal sebab mengapa muncul kemiskinan dalam suatu masyarakat sangat berbeda. Sekelompok ahli ilmu sosial melihat sebab munculnya dalam suatu masyarakat berkait dengan budaya hidup dalam suatu masyarakat. Sementara sekelompok lain melihat munculnya kemiskinan disebabkan karena adanya suatu ketidakadilan dalam pemilikan faktor produksi dalam masyarakat. Perspektif ketiga tentang sebab munculnya kemiskinan dalam masyarakat dikaitkan dengan model pembangunan yang dianut oleh suatu negara.

Para pendukung perspektif ini melihat bahwa model pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan akan menimbulkan kepincangan perkembangan antara sektor ekonomi moderen dan sektor ekonomi tradisional, dimana sebagian besar penduduk suatu negara sedang berkembang menggantungkan hidup mereka pada sektor tersebut. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi moderen akan memperoleh berbagai fasilitas ekonomi dan dukungan politik dari pemerintah agar mereka mampu membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi seperti ini maka pembangunan dan hasilnya akan dinikmati oleh sekelompok kecil manusia, sedang mayoritas penduduk akan hidup tanpa menikmati hasil pembangunan atau dengan kata lain harus hidup diluar pertumbuhan ekonomi yakni miskin (Soetrisno, 1997).

Dalam abad ini, bangsa-bangsa mulai memaknai arti kemiskinan. Sebab agenda kemiskinan sudah menjadi agenda utama bangsa-bangsa di dunia. Semua negara yang mempunyai nurani tentu akan mendorong isu pengentasan kemiskinan menjadi suatu gebrakan besar yang lebih fokus sebagai wahana mengejawantahkan keseriusan kolektif dalam mereduksi jumlah orang miskin.

Di Indonesia, masalah kemiskinan sudah sangat melekat dan telah menjadi determinan utama di dalam kehidupan bangsa hari ini dan masa akan datang. Data penduduk miskin tahun 2000 sudah mencapai 19,14% meskipun menurun sedikit menjadi 17,42% di tahun 2003, jumlah itu menunjukkan angka persentase penduduk miskin itu ternyata sama dengan 37,4 juta penduduk miskin. Artinya di antara kita terdapat 37,4 juta orang total populasi penduduk Indonesia yang masih hidup dalam kondisi miskin. Sementara pendapatan per kapita rata-rata per tahun diperkirakan baru mencapai 1000 dolar AS.

Kalau diasumsikan satu dolar AS adalah Rp 9.000,00 maka pendapatan perkapita rata-rata per tahun orang Indonesia hanya sebesar Rp. 9.000.000,00 atau sebesar 750.000,00 per bulan. Dengan kata lain setiap kepala keluarga setiap harinya hanya membawa pulang uang mata pencahariannya Rp. 25.000,00 per hari, dan bilamana ia menanggung biaya empat orang yang terdiri dari dirinya, istri, dan dua anaknya maka setiap orang Indonesia hanya memiliki uang sebesar Rp. 6.250,00. Hal ini tentu

mencengangkan, apa bisa dengan uang Rp.6.250,00 setiap anggota keluarga dapat mengalokasikan pengeluarannya sehari-hari terutama untuk pengeluaran kebutuhan pokok atau primer. Namun inilah realitas hidup hari ini kalau ditinjau dari sisi pendapatan perkapita rata-rata per tahun.

Kabupaten Pangkep sebagai salah satu daerah kabupaten di Sulawesi-Selatan memiliki wilayah perairan yang luas dan memiliki pesisir yang terbentang antara Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri dan Kecamatan Mandalle serta tiga kecamatan kepulauan yaitu Kecamatan Liukang Tupabiring, Kecamatan Liukang Kalmas dan Kecamatan Liukang Tangaya. Wilayah tersebut dihuni oleh berbagai golongan masyarakat dan berbagai macam profesi, salah satunya adalah nelayan.

Masyarakat nelayan di Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Pangkep menunjukkan angka kemiskinan yang tinggi sebanyak 724 rumah tangga miskin, dimana pada kelurahan tersebut adalah penerima tertinggi subsidi BBM, hingga tahun ini dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Pangkep (BPS Kab. Pangkep, 2006).

Masyarakat nelayan di Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep, berdasarkan hasil pengamatan sementara dari penulis menunjukkan adanya gejala "kemiskinan". Menurut Poli (1993),

kemiskinan pertama-tama menampakkan dirinya melalui gejala-gejala yang kelihatan dan terukur.

Beberapa gejala yang tampak dan dapat dijadikan indikator adanya kemiskinan pada masyarakat nelayan Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring antara lain: kondisi perumahan/pemukiman yang sebagian masih belum memadai, masih rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya peran serta rumah tangga miskin pada lembaga kemasyarakatan. Kondisi rumah tangga nelayan miskin Kelurahan Mattirosompe Kecamatan Liukang Tupabiring tersebut jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat nelayan yang tidak tergolong miskin di kelurahan tersebut dilihat dari kondisi perumahan, tingkat pendidikan, maupun keikutsertaan dalam lembaga kemasyarakatan.

Berdasarkan pengamatan tersebut maka menarik untuk diteliti tentang karakteristik sosial ekonomi rumah tangga nelayan miskin di Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah karakteristik sosial ekonomi meliputi: umur, pendidikan, keaktifan berlembaga, kondisi kehidupan, jam kerja, konsumsi, dan tabungan rumah tangga nelayan miskin di Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep?
2. Bagaimana hubungan sosial ekonomi meliputi: umur, pendidikan, keaktifan berlembaga, kondisi kehidupan, jam kerja, konsumsi, dan tabungan dengan pendapatan rumah tangga nelayan miskin di Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi meliputi: umur, pendidikan, keaktifan berlembaga, kondisi kehidupan, jam kerja, konsumsi, dan tabungan rumah tangga nelayan miskin di Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep.
2. Untuk mengetahui hubungan sosial ekonomi meliputi: umur, pendidikan, keaktifan berlembaga, kondisi kehidupan, jam kerja, konsumsi, dan tabungan dengan pendapatan rumah tangga nelayan miskin di Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan informasi kepada semua pihak terutama pemerintah dalam memahami karakteristik sosial ekonomi meliputi: umur, pendidikan, keaktifan berlembaga, kondisi kehidupan, jam kerja, konsumsi, dan tabungan rumah tangga nelayan miskin Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep.
2. Menambah bahan informasi dan referensi untuk dijadikan pembandingan dalam penelitian lebih lanjut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Bagi manusia yang tergolong miskin, kemiskinan adalah suatu yang nyata ada dalam kehidupan sehari-hari, karena dirasakan dan menjalani sendiri bagaimana hidup dalam kemiskinan. Walaupun demikian belum tentu sadar akan kemiskinan yang dijalani. Kesadaran akan kemiskinan baru terasa pada waktu membandingkan kehidupan yang dijalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan sosial ekonomi yang lebih tinggi.

Kondisi penduduk miskin semakin hari semakin bertambah terutama sejak negara ini dilanda krisis multidimensi yang menyebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk miskin. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa masyarakat miskin ditandai dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, ketidakmampuan melakukan kegiatan usaha produktif dan ketidakmampuan menjangkau akses sumberdaya sosial dan ekonomi serta ketidakmampuan menentukan nasibnya sendiri.

Berbagai persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak dari berbagai aspek baik aspek sosial, maupun aspek ekonomi. Aspek sosial terutama akibat terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan



informasi. Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, lemah mengantisipasi peluang.

Menurut Suyanto (1995) kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum seperti: pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Narayan (2000), berpendapat bahwa yang menyulitkan atau membuat kemiskinan itu sulit ditangani adalah sifatnya yang tidak saja multi dimensional tetapi juga saling terkait dengan dinamika, kompleks, syarat dengan sistem institusi (konsensus sosial), gender dan peristiwa yang khas perlokasi. Pola kemiskinan sangat berbeda antar kelompok sosial, umur, budaya, lokasi, dan negara juga dalam konteks ekonomi yang berbeda.

Lebih lanjut ada 4 dimensi utama dari defenisi kemiskinan yang dirumuskan oleh masyarakat miskin itu sendiri, sebagai berikut :

1. Dimensi pertama adalah dimensi material kekurangan pangan, lapangan kerja dengan muaranya adalah kelaparan atau kekurangan makan.
2. Dimensi kedua adalah dimensi psikologi, seperti antara lain ketidakberdayaan (*powerlessness*), tidak mampu berpendapat (*voicelessness*), ketergantungan (*dependency*), rasa malu (*shame*), rasa hina (*humiliation*).
3. Dimensi ketiga adalah dimensi akses ke pelayanan prasarana yang praktis tidak dimiliki.
4. Dimensi keempat adalah dimensi aset/milik, praktis tidak memiliki aset sebagai modal untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak seperti :
  - a. Modal fisik (*physical capital*), antara lain mencakup tanah, ternak peralatan kerja, hunian, perhiasan dan sebagainya.
  - b. Modal manusia (*human capital*), antara lain menyangkut kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.
  - c. Modal sosial (*social capital*), sering dicirikan dalam hal ini sebagai sistem kekerabatan yang mendukung kaum miskin untuk tetap bertahan hidup. Sebab pada umumnya kaum miskin tidak masuk jaringan formal pengamanan sosial seperti musibah, keungan dan lain-lain.

- d. Modal lingkungan (enviromental asset), antara lain mencakup iklim dan musim yang sangat berpengaruh pada petani, nelayan sebagai pekerja lapangan.

Lebih lanjut keempat dimensi tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks yang lebih luas yaitu tatanan ekonomi makro dan sistem politik yang berlaku di negara tersebut.

Beberapa pendapat lain melihat kemiskinan dari sudut pandang yang sangat berbeda dan menyimpulkan kemiskinan sebagai berikut :

1. Craig (1995), kemiskinan absolut yaitu bila penghasilan seseorang di bawah garis kemiskinan absolut yaitu ukuran tertentu yang telah ditetapkan dimana kebutuhan minimum masih dapat dipenuhi, dengan kata lain penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum yang ditetapkan dalam garis kemiskinan tersebut.
2. Penny (1992), kemiskinan relatif yaitu kondisi perbandingan antara kelompok penghasilan dalam masyarakat.

Ndraha (1987), pola waktu kemiskinan juga sering dibedakan sebagai berikut :

1. Kemiskinan menahun (*persistent poverty*), yaitu kemiskinan yang kronis atau sudah lama terjadi, turun temurun, misalnya masyarakat di lokasi-lokasi kritis atau terisolasi.
2. Kemiskinan siklik (*criclical poverty*), yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.

3. Kemiskinan musiman (*sesonal poverty*), yaitu kemiskinan yang sering terjadi secara khusus sesuai dengan musim seperti yang sering terjadi pada nelayan atau petani tanaman pangan.
4. Kemiskinan mendadak (*accidental poverty*), yaitu kemiskinan yang terjadi oleh sebab bencana atau dampak oleh suatu kebijakan yang tidak adil.

Kemiskinan dalam pengertian konvensional pada umumnya (*income*) komunitas yang berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Upaya pengentasan kemiskinan hanya bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan komunitas tersebut. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan permasalahan kemiskinan dari segi pendapatan saja tidak mampu memecahkan permasalahan komunitas. Karena permasalahan kemiskinan komunitas bukan hanya masalah ekonomi namun meliputi berbagai masalah lainnya. Kemiskinan dalam berbagai bidang ini disebut dengan kemiskinan plural.

Ada 6 macam kemiskinan yang ditanggung komunitas, yaitu :

1. Kemiskinan sub-sistensi, penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal.
2. Kemiskinan perlindungan, lingkungan buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak pemilikan tanah.

3. Kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan terbatasnya kesadaran atas hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan.
4. Kemiskinan partisipasi, tidak ada akses dan kontrol atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas.
5. Kemiskinan identitas, terbatasnya perbauran antar kelompok sosial, terfragmentasi.
6. Kemiskinan kebebasan, stres, rasa tidak berdaya, tidak aman baik di tingkat pribadi maupun komunitas.

Bila ditinjau dari konsep kebutuhan, maka 6 macam kemiskinan ini bisa diatasi dengan pemenuhan dua macam kebutuhan diatas. Kemiskinan ekonomi diatasi dengan memenuhi kebutuhan praktis sedang kemiskinan yang lain diatasi dengan pemenuhan kebutuhan strategis.

Ala (1996), mendefinisikan kemiskinan itu sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada) modal produktif atau aset (misalnya : organisasi sosial politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama partai politik, sindikasi, koperasi dan lain-lain), network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, dan informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan mereka.

Defenisi-defenisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa kemiskinan itu tidak hanya berkaitan dengan aspek-aspek material saja, tetapi juga menyangkut aspek-aspek non material, seperti yang disimpulkan oleh Scott (1975) bahwa:

- a. Kemiskinan pada umumnya didefenisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan didefenisikan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Kadang-kadang kemiskinan didefenisikan dari segi kurang atau tidak memiliki aset-aset seperti: tanah, rumah, peralatan, uang, emas, kredit dan lain-lain.
- c. Kemiskinan non-material meliputi berbagai macam kebebasan, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, hak atas rumah tangga, dan kehidupan yang layak.

Meskipun berbagai pihak melihat kemiskinan dari sudut pandang yang berbeda dan merumuskan kemiskinan secara berbeda pula tetapi semua pihak sepakat bahwa pada dasarnya kemiskinan mengandung arti majemuk yang sering kali sulit untuk dipahami dari satu sudut pandang saja. Namun secara umum bahwa kemiskinan diartikan sebagai suatu situasi/kondisi keterbelakangan, ketidakberdayaan atau ketidakmampuan yang dialami oleh

seseorang atau sekelompok orang untuk menyelenggarakan hidupnya suatu taraf yang dianggap manusiawi.

Kemiskinan merupakan permasalahan kemanusiaan purba. Kemiskinan bersifat laten dan aktual sekaligus telah ada sejak peradaban manusia ada dan hingga kini masih menjadi masalah sentral di belahan bumi manapun. Kemiskinan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi persoalan kemanusiaan lainnya seperti keterbelakangan, kebodohan dan keterlantaran. Problema buta huruf, putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia tidak bisa dipisahkan dari masalah kemiskinan.

Menurut United Nations Center for Human Settlement, kemiskinan lebih dari sekedar ketidakmampuan seseorang dalam memperoleh pendapatan, tetapi juga mengacu pada tidak adanya kemampuan fisik, aset dan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan standar seseorang.

Definisi lain tentang kemiskinan dikemukakan oleh Panjaitan (2002) bahwa, Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang yang tidak mempunyai kemampuan

memperoleh pendapatan sehingga standar hidupnya rendah dibandingkan dengan standar hidup yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Ciri-ciri mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan Pertama, mereka umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal atau keterampilan. Kedua, mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Ketiga, tingkat pendidikan yang rendah. Keempat, banyak diantara mereka yang tinggal di pedesaan dan tidak memiliki tanah. Kalaupun ada, maka tanahnya sangat sempit. Dan kelima, banyak di antara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan (skill) atau pendidikan.

Berdasarkan defenisi di atas, menunjukkan bahwa kemiskinan dapat dipahami sebagai tidak memadainya penghasilan seseorang atau keluarga. Mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan tempat berteduh. Ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan pokoknya karena tidak memiliki faktor produksi yang mencukupi seperti tanah, modal, atau keterampilan. Tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan.

## **B. Ukuran kemiskinan**

Menurut Djojohadikusumo dalam Partadireja (1993), bahwa indikator kemiskinan ada lima macam: makanan (pangan), pakaian (sandang), perumahan dan pemukiman (papan), kesehatan dan pendidikan. Kelimanya



ada dibawah garis kemiskinan tertentu yang disebut garis kemiskinan absolut. (*absolute poverty line*)

Biro Pusat Statistik mengusulkan ukuran garis kemiskinan dihitung melalui pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan minimum untuk hidup diukur dengan pengeluaran untuk makanan setara 2100 kalori per hari perkapita ditambah untuk kebutuhan non makanan yang meliputi perumahan, berbagai barang dan jasa, pakaian dan barang tahan lama, ([www.seputar indonesia.com](http://www.seputarindonesia.com)). Nilai rupiahnya diperoleh untuk daerah perkotaan sebesar Rp. 27.905,00 perkapita per bulan terdiri dari batas kecukupan pangan sebesar Rp. 23.303,00 dan batas kebutuhan non pangan sebesar Rp. 4.602,00 Untuk daerah pedesaan sebesar Rp. 18.244,00 yang terdiri dari batas kecukupan pangan sebesar Rp. 15.576,00 dan batas kecukupan non pangan sebesar Rp. 2.668,00 Sedangkan dengan pendekatan Bank Dunia menggunakan 2 dolar AS per orang per hari adalah contoh pengukuran kemiskinan absolut ([www.Literaturjurnal ekonomi ideologis.com](http://www.Literaturjurnalekonomiideologis.com)).

Dalam satu negara sekalipun, ukuran atau indikator kemiskinan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain juga berbeda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh soetrisno menunjukkan bahwa bagi orang Jawa, orang miskin ditandai oleh indikasi sebagai berikut: (1) rumah yang kumuh, (2) tidak memiliki pakaian yang cukup baik untuk menghadiri pertemuan, (3) tidak memiliki pekerjaan yang tetap, (4) tidak memiliki persediaan pangan, (5) tidak

memiliki tanah atau ternak besar. Sedangkan yang menjadi indikator kemiskinan bagi orang Aceh adalah apa yang mereka sebut secara umum sebagai “ketinggalan” yakni kesulitan orang Aceh dalam akses terhadap berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan penghubung dari kecamatan ke desa yang penting untuk memasarkan hasil pertanian mereka, (Soetrisno. 1997).

Oleh karena itu, Lanjut Soetrisno, tugas peneliti adalah menginventarisasi definisi dan indikator lokal tentang kemiskinan dan apabila mungkin memetakannya ini sangat penting bagi upaya pemerintah untuk menciptakan bentuk program yang sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya dari kelompok miskin yang ada dalam desa itu. Hal itu dilakukan dengan definisi dan indikator kemiskinan lokal maka program-program itu akan mubazir.

Dari berbagai teori tentang apa dan bagaimana kemiskinan itu, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa definisi, ukuran dan sebab-sebab kemiskinan itu multi dimensi, sehingga cara untuk menanggulangnya juga harus multi-dimensi, tergantung pada ukuran, definisi, dan sebab-sebab munculnya kemiskinan tersebut.

### **C. Masyarakat Nelayan**

Jika kita membatasi diri pada definisi tentang masyarakat, maka masyarakat itu merupakan kelompok-kelompok individu yang teratur, dimana setiap kelompok manusia saling bergaul dan berinteraksi dan bekerjasama dalam jangka waktu yang cukup lama.

Menurut Matulada (1993), masyarakat pesisir adalah sekelompok manusia yang hidup bekerjasama di suatu daerah tertentu yang disebut pantai. Sementara itu orang bertempat tinggal di pesisir pantai dan mempunyai mata pencaharian pokok sebagai penangkap ikan dan hasil laut lainnya disebut nelayan.

Dalam masyarakat dikenal dua kelompok besar yang menghasilkan ikan, yaitu masyarakat pembudidaya ikan (seperti penambak dan pengempang) serta masyarakat yang menangkap ikan di laut (nelayan). Walaupun kedua kelompok ini sama-sama menghasilkan ikan, namun pola kerjanya berbeda. Pola kerja budidaya ikan lebih menyerupai pertanian atau peternakan, sehingga kebutuhan tenaga kerja, modal, pengaturan air, dan masa panen dapat diperhitungkan dengan mudah, sebaliknya penangkapan ikan di laut bergantung pada kemudahan bersama karena tempat usaha tergolong liar, berpindah-pindah, dan ikan yang ditangkap berkembang biak secara alamiah.

Nelayan yang menangkap ikan dilaut dibagi dalam dua kelompok yaitu perikanan berskala besar dan berskala kecil. Perikanan berskala besar

diorganisasikan melalui cara yang serupa dengan perusahaan agro-industri di negara-negara maju yang relatif padat modal, sedangkan perikanan berskala kecil umumnya bertumpang tindih dengan kegiatan lain, seperti pertanian, peternakan, budidaya ikan, dan biasanya padat karya.

Mubyarto dan kawan-kawan (1984), dalam penelitian di Jepara, lebih menekankan kondisi ekonomi dalam menentukan stratifikasi masyarakat nelayan. Berdasarkan, kondisi ekonomi ini, nelayan dikelompokkan menjadi : (1) nelayan kaya yang mempunyai kapal (juragan) sehingga mempekerjakan nelayan lain sebagai pendega tanpa ia sendiri harus ikut bekerja, (2) nelayan kaya yang memiliki kapal, tetapi ia sendiri masih ikut bekerja sebagai awak kapal, (3) nelayan sedang yang kebutuhan hidupnya dapat ditutup dengan pendapatan pokoknya dari bekerja sebagai nelayan, dan memiliki perahu tanpa mempekerjakan tenaga dari luar keluarga, (4) nelayan miskin yang pendapatan dari perahunya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga harus ditambah dengan bekerja lain, baik untuk ia sendiri atau untuk istri dan anak-anaknya, (5) nelayan pendega atau tukang kiteng.

Selama ini para perencana pembangunan selalu bias memandang masyarakat nelayan. Nelayan selalu diperlakukan sama dengan petani atau kelompok masyarakat lainnya. Ditinjau dari segi mata pencaharian, antara nelayan dan petani menunjukkan perbedaan yang berarti. Sebagai gambaran adalah pemilikan alat produksi. Pada masyarakat perikanan, alat produksi, serta modal dan peralatan penangkapan, cenderung dikuasai oleh punggawa

sedang sawi tidak memiliki apa-apa (Hamid, 2001). Sementara dalam pertanian, lahan pertanian dan modal dikuasai oleh tuan tanah. Begitu pula dalam hal eksploitasi sumber daya, yang pada perikanan dilakukan secara bebas, tanpa adanya batas-batas wilayah yang jelas seperti pada sumberdaya pertanian. Sumberdaya perikanan juga bersifat milik masyarakat bersama, sehingga siapa saja yang menguasai atau memiliki modal dan sarana penangkapan adalah mereka yang mampu meningkatkan hasil tangkapan. Oleh sebab itu, dalam perikanan penguasaan sumber daya lebih ditentukan oleh faktor kepemilikan modal dan penguasaan teknologi (Wahyono, et al, 2001).

Sementara itu, berdasarkan status penguasaan modal nelayan dibagi menjadi nelayan pemilik dan nelayan buruh. Nelayan pemilik atau juragan adalah orang yang memiliki sarana penangkapan, seperti kapal/perahu, jaring dan alat tangkap lainnya. Sementara nelayan buruh adalah orang yang menjual jasa tenaga kerja sebagai buruh dalam kegiatan penangkapan ikan laut, atau sering disebut anak buah kapal (ABK), (Satria, 2002).

Lebih lanjut Satria (2002) menggolongkan nelayan menjadi empat tingkatan yang dilihat dari kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada), orientasi pasar, dan karakteristik hubungan produksi. Pertama, *peasant-fisher* atau nelayan tradisional yang biasanya lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri (*subsistence*). Alokasi hasil tangkapan yang dijual lebih

banyak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (khususnya pangan) dan bukan diinvestasikan kembali untuk pengembangan skala usaha. Umumnya, menggunakan alat tangkap tradisional dayung atau sampan tidak bermotor dan masih melibatkan keluarga sebagai tenaga kerja utama. Kedua, *post peasant-fisher* yang dicirikan dengan penggunaan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju seperti motor tempel atau kapal motor. Umumnya nelayan jenis ini masih beroperasi di wilayah pesisir dan sudah mulai berorientasi pasar, dan tenaga kerjanya sudah meluas dan tidak tergantung pada anggota keluarga saja. Ketiga, *commercial-fisher*, yaitu nelayan yang telah berorientasi pada peningkatan keuntungan. Skala usahanya sudah besar yang dicirikan dengan banyaknya jumlah tenaga kerja dengan status yang berbeda dari buruh hingga manajer. Teknologi yang digunakan pun lebih modern dan membutuhkan keahlian tersendiri dalam pengoperasian kapal maupun alat tangkapnya. Keempat, *industrial-fisher* cirinya adalah (a) lebih padat modal, (b) pendapatan lebih tinggi, dan (c) hasilnya orientasi ekspor.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka masyarakat nelayan di Desa Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring sebagian besar tergolong pada golongan nelayan tradisional (*pesant-fisher*) dimana penghasilan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri. Akibat dari penggunaan trawl oleh nelayan (Paddenreng) dari daerah lain menyebabkan hasil tangkapan nelayan lokal semakin menurun. Disamping itu, kegiatan

penangkapan ikan tidak selamanya dapat dilakukan artinya pada musim tertentu kegiatan pergi ke laut tidak dapat dilakukan.

#### **D. Karakteristik Sosial ekonomi masyarakat nelayan**

Karakteristik sosial ekonomi masyarakat nelayan yang dikemukakan oleh Prinz dalam Achison, et al (1990) antara lain:

- a. Pendapatan keluarga rata-rata rendah
- b. Variasi usaha alternatif di luar sektor perikanan sangat terbatas.
- c. Ketergantungan ekonomi hampir sepenuhnya kepada pihak luar (pedagang, penguasa dan pemerintah).
- d. Pendidikan dan keterampilan relatif rendah.
- e. Rendahnya gizi dan mutu kondisi kesehatan .
- f. Kondisi lingkungan tidak/kurang bersih.
- g. Tradisionalisme banyak mendominasi berbagai aspek kehidupan, termasuk produksi, pemasaran, dan pola konsumsi.
- h. Jenis usaha cenderung homogen.
- i. Masyarakat kurang terstratifikasi, cenderung elegetarian, berbeda dengan kelompok-kelompok pelajar yang bergerak di bidang transportasi laut yang cenderung berkelas-kelas.

Kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat sangat mempengaruhi keadaan lingkungan pemukiman, pekerjaan dan kemampuan untuk mengakses pendidikan. Kondisi sosial ekonomi atau masyarakat secara

umum dapat dilihat dari besar kecilnya pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan keperluan untuk mengakses pendidikan. Kondisi sosial ekonomi atau masyarakat secara umum dapat dilihat dari besar kecilnya pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan keperluan untuk memenuhi kebutuhan hidup standar seperti pangan, sandang, dan papan. Sesuai dengan pendapat Efendi (1996), yang mengemukakan bahwa besar kecilnya pendapatan seseorang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kemakmuran rumah tangga, bahkan dengan penghasilan yang memadai dapat mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan.

Untuk melakukan perubahan kondisi masyarakat dari masyarakat yang kondisi sosial ekonominya sedang, diperlukan upaya pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan dapat berupa pembangunan fisik berupa perbaikan jalan, penyediaan fasilitas perumahan dan pembangunan rumah sederhana.

Sementara pembangunan non fisik/biasa dikenal dengan pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan sumberdaya manusia menurut Tjokrowinoto (1986) adalah secara konvensional diartikan sebagai investasi human capital yang harus sejalan dengan investasi physical capital. Cakupan pembangunan sumber daya manusia ini, meliputi pendidikan dan latihan, kesehatan, gizi, penurunan fertilitas dan pembangunan enterpreunial yang kesemuanya bermuara pada peningkatan



fertilitas manusia karenanya, indikator kinerja pembangunan sumberdaya mencakup indikator-indikator pendidikan, kesehatan, gizi dan sebagainya.

Umumnya masyarakat nelayan masih hidup dalam keterbatasan, baik keterbatasan ekonomi, sosial, maupun keterbatasan dalam bidang pendidikan dan keterbatasan akses sumberdaya. Keterbatasan ekonomi ini nampak pada tingkat pendapatan nelayan yang pada umumnya masih rendah. Memang ada nelayan yang dari segi ekonomi cukup berhasil, namun disamping jumlahnya tidak banyak, juga keberhasilan itu lebih nampak pada mereka yang merangkap profesi sebagai pedagang (Wahyono, et al, 2001).

Keterbatasan sosial terwujud pada ketidakmampuan masyarakat nelayan dalam mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi pasar secara menguntungkan yang ditunjukkan oleh lemahnya mereka mengembangkan organisasi ke luar lingkungan kerabat mereka atau komunitas lokal. Kondisi sosial ekonomi masyarakat pada umumnya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam dimana masyarakat tersebut berdomisili. Kondisi sosial ekonomi memberikan gambaran terhadap tingkat kesejahteraan ataupun pendapatan masyarakat, jenis atau keragaman mata pencaharian yang ditekuni, dan upaya-upaya individu maupun kelompok dalam meningkatkan kesejahteraannya (Gaus, 2001).

Menghadapi kenyataan kehidupan nelayan yang seperti itu maka ada dua pilihan yang dilakukan masyarakat nelayan yaitu menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan atau melakukan perlawanan dengan

kekerasan. Pilihan pertama tidak mungkin dilakukan mengingat kemiskinan yang dialami dan pendidikan yang dimiliki tidak mampu merespon setiap perubahan sosial ekonomi yang terjadi di sekitarnya sebagai contoh kredit perbankan yang sulit diperoleh nelayan tradisional karena tidak adanya agunan, sehingga semakin mempersulit kehidupan nelayan.

Masyarakat pesisir umumnya bekerja sebagai nelayan. Ciri masyarakat nelayan pada umumnya terbelakang dan miskin. Mereka bermukim di daerah pantai yang pada umumnya merupakan tanah negara, tanah kehutanan, tanah timbul, tanah milik dan tanah adat. Permasalahan ekonomi yang melingkupi nelayan berkaitan dengan modal usaha yang kecil, penghasilan yang tidak menentu serta kegiatan ekonomi yang hanya terbatas pada satu produk saja yaitu ikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kemiskinan tersebut muncul karena kelompok masyarakat tidak terintegrasi dengan masyarakat luas, apatis, cenderung menyerah pada nasib, tingkat pendidikan rendah serta tidak mempunyai daya juang dan kemampuan untuk memikirkan masa depan (Chambers, 1983). Dalam beberapa kasus, penghasilan mereka hanya dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, meskipun mereka telah bekerja keras (Evers, 1994).

Kemiskinan sosial diartikan sebagai lemahnya jaringan sosial, struktur sosial yang kurang mendukung serta keterbatasan akses bagi seseorang untuk meningkatkan sumber daya yang ada (Effendi, 1993).

Dilihat dari sumber daya manusia nelayan paling tinggi 80% tamat sekolah dasar, bahkan banyak yang tidak tamat atau tidak sekolah sama sekolah sama sekali. Fakta tersebut mengisyaratkan kemampuan nelayan mengelola sumber daya alam pesisir sangat terbatas. Ini disebabkan karena mereka identik dengan berbagai perilaku sosial yang tidak menguntungkan selama ini, misalnya budaya konsumtif, menyebabkan mereka terjebak pada lingkaran utang dan kemiskinan.

Pendidikan untuk nelayan pada hakekatnya merupakan *human investmen* dan sosial kapital, baik untuk kepentingan pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Pendidikan merata dan bermutu baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal akan berdampak pada kecerdasan dan kesejahteraan nelayan. Demikian halnya dengan pendidikan memadai, paling tidak dapat dijadikan modal untuk mencari dan menciptakan peluang-peluang kerja yang dapat menjadi sumber kehidupan dan peningkatan kesejahteraan. Dalam banyak hal terjadi kemiskinan nelayan bukan semata-mata karena masalah ekonomi akan tetapi salah satu penyebabnya adalah pendidikan yang rendah.

Rendahnya tingkat pendidikan akibatnya anak akan mewarisi secara tradisional pekerjaan dari orangtuanya sehingga produktivitas nelayan akan tetap rendah. Dengan kondisi demikian, para nelayan tetap banyak bergantung dan tidak mampu menghadapi eksploitasi dari pedagang atau tengkulak dan pemilik kapal atau perahu.

Hal itu tentu jauh dari harapan olehnya itu diperlukan regenerasi nelayan yang memiliki kemandirian, kompetensi dan kapasitas yang memadai. Solusinya tentu kita harus menyediakan pendidikan yang baik, kalau tidak generasi nelayan makin terbelakang. Disini pemerintah daerah dan masyarakat harus mempunyai perhatian serius. Masalahnya apakah pendidikan itu cocok dengan gaya hidupnya, serta menjadi nilai tambah bagi keluarganya. Maka relevansi pendidikan dan setting pembelajarannya harus disesuaikan dengan kehidupan nelayan kita.

Menyadari pentingnya pendidikan sebagai *human investmen* dan sosial kapital maka generasi nelayan harus diberikan sistem pendidikan yang memadai terutama pendidikan formal agar mereka mampu berkompetisi di dunia global.

Peningkatan sumber daya nelayan Kelurahan Mattiro Sompe hampir dikatakan dibatasi oleh waktu. Hal ini di karenakan waktu di darat hanya sekitar sembilan sampai sepuluh jam dalam sehari, dan itupun lebih banyak digunakan untuk memperbaiki dan merawat peralatan, sehingga nelayan tidak bisa mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan untuk meningkatkan keterampilan.

Kemiskinan ekonomi diartikan sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Fenomena kemiskinan ekonomi umumnya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak tersebut (Esmara, 1986).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ilham (2004), bahwa strategi peningkatan pendapatan masyarakat nelayan di Kecamatan Lakudo dapat dilakukan melalui : (1) peningkatan sumberdaya manusia seperti kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, (2) peningkatan modal dalam bentuk penggunaan teknologi dalam hal ini motorisasi, (3) peningkatan kemampuan mengorganisasikan diri melalui lembaga-lembaga produktif, penguatan sistem kelembagaan yang bersifat kegotongroyongan dan kekeluargaan, (4) pengembangan dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal. Selain itu juga harus ada upaya dari pemerintah daerah setempat dengan cara membantu pemberian bantuan dana (kredit dan hiba), pembuatan dan perluasan jaringan informasi serta pengelolaan kawasan konservasi laut secara terpadu.

#### **E. Kelembagaan Masyarakat Pesisir**

Lembaga adalah sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tertentu. Selanjutnya dikatakan bahwa lembaga termasuk norma-norma masyarakat yang paling resmi dan bersifat memaksa (Horton dan Hunt, 1993).

Roucek dan Warren (1984) mendefinisikan lembaga sebagai pola organisasi untuk memenuhi berbagai keperluan manusia, yang lahir dengan berbagai adanya budaya sebagai suatu ketetapan untuk menggunakannya

secara tetap, memperoleh konsep kesejahteraan masyarakat, dan melahirkan suatu struktur. Lembaga adalah konsep yang terpadu dengan struktur, dengan demikian bermakna bahwa lembaga bukan saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi keperluan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya.

Masyarakat pesisir dalam hal ini pencari ikan atau nelayan maupun petani tambak, keduanya hidup dalam kelompok khususnya kelompok kerja. Pada fase awal umumnya kelompok kerja masih sepenuhnya berhimpit dengan kelompok keluarga rumah tangga, dalam arti bahwa semua pekerjaan baik pengelolaan maupun pengolahan, semuanya dilakukan oleh tenaga kerja keluarga rumah tangga nelayan dan dikelompokkan sebagai nelayan individual. Setelah usaha berkembang maka mempekerjakan tenaga dari luar keluarga sebagai pekerja tetap, pekerja tersebut selanjutnya disebut sawi (Sallatang, 1994). Selanjutnya dinyatakan bahwa nelayan yang mempekerjakan sawi tersebut mulai nampak sebagai punggawa dan kelompok kerja tersebut dikenal dengan kelompok punggawa sawi.

Dalam komunitas masyarakat nelayan memiliki kelompok-kelompok yang tujuannya mencari keuntungan yang bersifat sosial ataupun keagamaan. Dilihat dari proses kemunculannya, kelompok tersebut dapat dibedakan menjadi tiga yakni : pertama kelompok yang muncul atas inisiatif sendiri, misalnya kelompok-kelompok nelayan. Kedua, kelompok yang muncul atas dorongan tokoh-tokoh masyarakat setempat misalnya kelompok

pengajian, kelompok simpan pinjam/arisan. Ketiga, kelompok yang muncul karena dibentuk oleh pemerintah misalnya PKK, LPM, kelompok nelayan, dan koperasi nelayan.

Secara teoritis, dengan memberikan tanggung jawab yang besar kepada kelompok-kelompok yang mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap suatu sumberdaya akan sangat menolong bagi minimisasi konflik antara berbagai jenis alat tangkap, menjamin tercapainya equity alokasi kesempatan melakukan penangkapan ikan, mengurangi konflik antara pemerintah dan *stakeholders*, mengurangi kelebihan investasi baik dari nelayan maupun dari industri perikanan, memperbaiki kualitas data dan analisisnya, mempromosikan konservasi dan ketersediaan stok, dan memberdayakan masyarakat pesisir dalam orientasi pembangunan ekonomi masyarakat yang mandiri.

#### **F. Hubungan Produktivitas, Pengeluaran Konsumsi dengan Pendapatan**

Pendapatan merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, hal ini tidak lain karena pendapatan merupakan tolak ukur untuk melihat apakah suatu bangsa mengalami kemajuan atau kemunduran, atau dengan kata lain, besar-kecilnya pendapatan merupakan gambaran tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Menurut Winardi (1972), pendapatan adalah hasil berupa uang atau hasil materil lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia bebas.

Menurut Wasana (2005) pendapatan diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi.

Menurut Suryana (2000), penghitungan pendapatan dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan penerimaan.

1. Pendapatan dengan pendekatan produksi

Perhitungan pendapatan dengan pendekatan produksi dilakukan melalui perhitungan terhadap nilai produksi yang dihasilkan dalam pemanfaatan faktor-faktor produksi, tanpa membedakan siapa pemilik faktor-faktor produksi tersebut, dan hasil perhitungan ini disebut pendekatan domestik kotor. Dalam pendekatan produksi ini yang dihitung hanyalah nilai tambahnya saja, yaitu selisi antara nilai penjualan perubahan dengan nilai pembelian bahan mentah dan jasa-jasa lain, dan apabila nilai tambah ini dikurangi dengan pendapatan orang asing maka diperoleh pendapatan nasional kotor.

2. Pendapatan dengan pendekatan pengeluaran.

Perhitungan pendapatan dengan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan semua pengeluaran-pengeluaran berbagai unsur



masyarakat, dan yang dihitung bukanlah nilai dari arus barang dan jasa dan dari transaksi penjualan dan pembelian, tetapi hanya jasa dan arus barang akhir.

### 3. Pendekatan penerimaan

pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan pendapatan dari faktor-faktor produksi yang digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa. Pendapatan yang dihitung adalah pendapatan yang diperoleh dari mereka yang memiliki faktor-faktor produksi, seperti para pemilik modal, para pekerja dan para pengusaha yang akan memperoleh gaji, sewa, rente dan profit.

Untuk mengetahui lebih jelas, bagaimana keterkaitan variabel produktivitas, beban ketergantungan serta pengeluaran konsumsi masyarakat, selanjutnya dikemukakan secara normatif, sebagai berikut:

#### a. Hubungan produktivitas dan pendapatan

Pendapatan merupakan balas jasa dari faktor-faktor produksi yang dimanfaatkan dalam kegiatan-kegiatan produktif, maka pendapatan sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja dan faktor-faktor produksi lainnya.

Menurut Suryana (2000) menjelaskan, bahwa pendapatan perkapita akan naik, bila produktivitas perkapita naik.

Menurut Thompson (1984), *one factor that may help explain both low work experience and low wages income* (salah satu faktor yang dapat membantu mengukur produktivitas kerja yang berhubungan dengan

pendapatan adalah kurangnya pengalaman kerja dan rendahnya upah dari modal, tenaga kerja)

Jhingan (2000) menjelaskan selanjutnya bahwa pertumbuhan perekonomian modern yang dapat dilihat melalui peningkatan dan laju kenaikan jumlah perkapita, terutama disebabkan oleh perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas per unit input, efisiensi input ini dapat dilihat dari semakin besarnya pengaruh input modal dan tenaga kerja terhadap output.

Kuznets lanjut menjelaskan dalam Jhingan (2000), bahwa laju kenaikan produktivitas tersebut nyata dapat menjelaskan hampir keseluruhan pertambahan produk perkapita negara maju.

Sedang Todaro (1995) mengemukakan bahwa sehubungan dengan kesehatan fisik seseorang, terdapat hubungan yang erat antara tingkat pendapatan dan produktivitas yang rendah di negara-negara berkembang.

Menurut Irawan dan Suparmako (1999) produktivitas di negara-negara sedang berkembang adalah rendah sehingga mengakibatkan rendahnya produksi pula.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat diketahui, bahwa antara pendapatan dan produktivitas seseorang mempunyai pengaruh dan keterkaitan yang cukup besar, dengan suatu asumsi bahwa kondisi fisik seseorang baik, pendidikan menunjang maka orang tersebut akan mempunyai produktivitas yang tinggi, dan oleh karenanya orang tersebut

akan dapat memberikan penghasilan yang tinggi, sebaiknya apabila kesehatan, pendidikan tidak menunjang, dan pengalaman tidak ada, jelas akan berpengaruh pada rendahnya produktivitas, dan tentu pendapatan juga sulit untuk ditingkatkan.

Teori klasik dalam Wirakartakusumah (1998) menjelaskan, bahwa faktor-faktor produksi yang dimanfaatkan akan memberikan pendapatan, namun penambahan input khususnya tenaga kerja, sementara faktor lainnya tetap, maka pada tingkat produksi tertentu, tambahan input akan berdampak pada pertumbuhan produksi semakin berkurang, ini berarti tenaga yang dipekerjakan semakin tidak produktif di mana tambahan input tenaga kerja tambahan hasil yang dapat dihasilkan.

Arsyad (1999) menjelaskan prinsip penurunan produktivitas marginal menyatakan bahwa jika ada kenaikan jumlah input variabel (tenaga kerja) yang disamakan untuk melengkapi input-input lainnya (modal, tanah dan lain-lain), maka pada suatu titik tertentu produk marginal dari input variabel tersebut akan menurun. Oleh karena itu tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah bisa disebabkan oleh tidak adanya atau kurangnya input komplementer.

Menurut Suryana (2000) produktivitas seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi, adalah:

- a. Jumlah dan mutu faktor-faktor produksi yang terbatas, semakin banyak jumlah dan semakin baik mutu modal, tenaga kerja, alam dan skill yang dimiliki oleh suatu negara, produktivitas akan semakin baik.
- b. Alokasi dan sumber-sumber, artinya perimbangan-perimbangan cara pemakaian faktor-faktor produksi di antara berbagai faktor ekonomi dalam masyarakat bersangkutan dan kombinasi faktor-faktor tersebut dalam sektor ekonomi yang bersangkutan.
- c. Distribusi pendapatan yang adil, artinya distribusi pendapatan yang adil akan mendorong semangat kerja dan apabila semangat kerja meningkat otomatis produktivitas akan naik pula.
- d. Aspek-aspek masyarakat, kegiatan ekonomi selalu berlangsung dalam suatu masyarakat, karena itu dalam pembangunan tidak lepas dan harus memperhitungkan corak hidup, kebudayaan, tradisi, politik dan nilai-nilai sosial masyarakat.

Sedangkan menurut Meier dan Baldwin (1972), menjelaskan bahwa produktivitas tidak saja dipengaruhi oleh akumulasi kapital, tetapi juga inovasi teknologi.

Menurut Arsyad (1999), menjelaskan bahwa produktivitas jasa pekerja yang rendah bisa disebabkan oleh tidak adanya atau kurangnya input komplements seperti modal fisik dan atau manajemen yang baik.

Menurut Suharjo (1989) produksi naik, maka proses produksi menjadi lebih efisien, karena :

- a. Manajemen yang lebih baik, kombinasi faktor-faktor produksi alam, tenaga manusia dan modal menjadi lebih efisien. Manajemen yang lebih baik diperoleh dari pemilihan keahlian yang tepat dan motivasi yang tinggi dari para manajer. Cara lain dapat dilakukan melalui tambahan pengetahuan dan keahlian serta melalui pendidikan dan latihan.
- b. Menggunakan dan memilih sumberdaya alam yang lebih tepat sehingga biaya dapat ditekan. Hal ini dilakukan melalui substitusi sumberdaya alam yang lebih menguntungkan.
- c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja serta memberi motivasi kerja yang lebih baik, hal ini dapat dicapai melalui :
  1. Meningkatkan kualitas fisik tenaga kerja melalui gizi yang lebih tepat.
  2. Mengusahakan agar upah tenaga kerja mencukupi kebutuhan dasar secara minimum, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan.
  3. Menambah insentif untuk memotivasi pekerja.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa meningkatkan produktivitas pekerja, perlu didukung oleh faktor-faktor produksi, terutama tenaga kerja yang berpendidikan, terampil, sehat secara fisik dan rohani, dan ditunjang oleh modal yang cukup dan lahan yang produktif, selain hal itu perlu upaya

yang mengarah pada kegiatan-kegiatan motivasi, seperti memberikan insentif kepada pekerja.

b. Hubungan Pengeluaran Konsumsi dan Pendapatan

Pengeluaran konsumsi dan pendapatan merupakan dua variabel yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan derajat kemiskinan masyarakat, semakin tinggi pendapatan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut, sebaliknya semakin tinggi bagian pendapatan yang dikonsumsi, dapat diduga bahwa kelompok masyarakat tersebut berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, bahkan untuk kelompok masyarakat tertentu dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsinya kemungkinan akan mencapai kondisi *dissaving*.

Pada kelompok masyarakat yang memiliki pengeluaran konsumsi tinggi atau kelompok masyarakat yang memanfaatkan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi, akan sulit untuk bangkit dari jurang kemiskinan, karena kesempatan untuk menabung atau melakukan investasi sangat kecil.

Pada umumnya, tingkat pendapatan yang rendah, pengeluaran konsumsi sebagian besar diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang sangat minim.

Analisis Keynes menjelaskan bahwa penambahan produksi dan pendapatan nasional bukan ditentukan oleh pertumbuhan kapasitas produksi dari masyarakat, melainkan oleh pengeluaran masyarakat.

Pendapatan rumah tangga sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Makin tinggi pendapatan tingkat konsumsi makin tinggi. Karena ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi besar atau mungkin juga pola hidup menjadi konsumtif, setidaknya semakin menuntut kualitas yang baik, (Rahardja dan Mandala manurung, 2004)

Hal ini memperjelas keterkaitan pendapatan dengan pengeluaran konsumsi masyarakat, bahwa produksi atau pendapatan tidak semata-mata ditentukan oleh perbaikan produktivitas faktor-faktor, tetapi ditentukan oleh besarnya pengeluaran masyarakat. Semakin tinggi pengeluaran masyarakat semakin tinggi pula kenaikan pendapatan, untuk menunjukkan kenaikan dalam pendapatan nasional dan menciptakan pertumbuhan ekonomi, haruslah keseluruhan permintaan masyarakat selalu meningkat.

Antara pengeluaran konsumsi dan pendapatan terdapat suatu hubungan ganda :

1. Hubungan yang ada dalam fungsi konsumsi, konsumsi tinggi atau rendah, naik atau turun, karena pendapatan tinggi atau rendah.
2. Konsumsi adalah faktor penting dalam menentukan pendapatan, apabila konsumsi tinggi atau rendah naik atau turun, maka pendapatan cenderung menjadi tinggi atau rendah, menjadi bertambah atau berkurang, (Ackley 1983).

Proses keterkaitan pengeluaran konsumsi masyarakat menciptakan perubahan dalam pendapatan, hal ini tidak dapat terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh efek pengganda (*multiplier effect*) dari pengeluaran konsumsi.

Menurut Dernburg dan Mc Dougall (1982) diartikan sebagai perbandingan kenaikan pendapatan terhadap kenaikan belanja gabungan yang menyebabkan kenaikan pendapatan.

Dalam model persamaan, angka multiplier efek tersebut dirumuskan sebagai berikut :

$$k = \frac{1}{1 - b} \quad \text{Dernburg dan Mc Dougall (1982)}$$

Kabalikan dari angka pengganda ini merupakan hasrat menabung (*marginal propensity to saving*), maka untuk mendapatkan besarnya perubahan pendapatan sebagai akibat perubahan pengeluaran konsumsi dapat dipergunakan model sebagai berikut :

Dernburg dan Mc Dougall (1982)

$$\Delta Y = k \cdot \Delta I$$

Di mana :

$\Delta Y$  = Perubahan Pendapatan

$\Delta I$  = Perubahan Investasi

$k$  = Multiplier



Di atas dijelaskan bahwa pengeluaran konsumsi seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh pendapatan, tetapi beberapa ahli mengatakan bahwa hasrat konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan, namun dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Dernburg dan Mc Dougall (1982), mengatakan bahwa sikap belanja dari konsumen dipengaruhi oleh serangkaian faktor-faktor yang kompleks dan saling berhubungan; sifat-sifat kedemografian, umur, besarnya keluarga dan sebagainya mempengaruhi besarnya pendapatan yang akan dihasilkan dan ditabung.

Menurut Lipsey dkk, yang diterjemahkan oleh Wasana (2005) menjelaskan ketika pendapatan rumah tangga nol, rumah tangga tersebut tetap akan meminta, meminjam atau mengambil dari tabungan untuk mengkonsumsi suatu jumlah minimum. Tingkat pengeluaran konsumsi ini bersifat otonomi. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga, semakin besar konsumsi rumah tangga itu. Bagian konsumsi ini diinduksi; yaitu berubah-ubah sesuai dengan pendapatan disposibel.

Menurut Mangkoesoebroto (1998) besar kecilnya pengeluaran konsumsi hanya didasarkan atas besar kecilnya tingkat pendapatan masyarakat, dan pengeluaran konsumsi akan meningkat dengan bertambahnya penghasilan, secara matematis dirumuskan sebagai berikut :

$$C = C_0 + cY_d$$

Di mana  $C$  = Besarnya konsumsi

$C_0$  = Besarnya konsumsi pada pendapatan nol

$c$  = Marginal propensity to consume

$Y_d$  = Pendapatan disposable

Menurut Duesenberry dalam Mangkoesoebroto (1998) mengemukakan konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif dengan asumsi sebagai berikut :

1. Selera sebuah rumah tangga atas barang konsumsi adalah independen, artinya pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran orang sekitarnya (tetangga).
2. Pengeluaran adalah irreversible, artinya pengeluaran seseorang pada saat penghasilan naik berbeda dengan pola pengeluaran pada saat pengeluaran mengalami penurunan.

Dengan melihat beberapa pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam pembentukan konsumsi dari pendapatan, variabel pokok yang mempengaruhi konsumsi adalah pendapatan, karena setiap perubahan pendapatan akan dapat mengubah konsumsi dan pergeseran-pergeseran dalam tabungan.

## G. Kerangka Pikir

Kegagalan konsep pembangunan bangsa Indonesia yang berorientasi pada sektor ekonomi berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan konsep ini selain mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga mampu menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi keberhasilan itu hanya terjadi pada orang, kelompok, atau daerah tertentu sehingga tetap terjadi kesenjangan

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan kurang berhasil atau berdaya guna karena beberapa sebab: pertama, program-program ini direncanakan oleh pemerintah atas dasar persepsi dan asumsi yang keliru terhadap sebab-sebab munculnya kemiskinan. Kedua, perencanaan program anti kemiskinan dilakukan secara *uniform* baik dari segi bentuk dan model pelaksanaannya tanpa memperhatikan adanya variasi dari berbagai definisi serta sebab terjadinya kemiskinan. Ketiga, lemahnya *monitoring* dari pemerintah terhadap pelaksanaan program anti kemiskinan yang berakibat terjadinya penyimpangan baik dari segi seleksi penerima program maupun biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan program tersebut. Keempat, kurangnya dukungan penelitian masalah-masalah kemiskinan, dan evaluasi tentang dampak dari program-program anti kemiskinan terhadap perbaikan hidup orang miskin

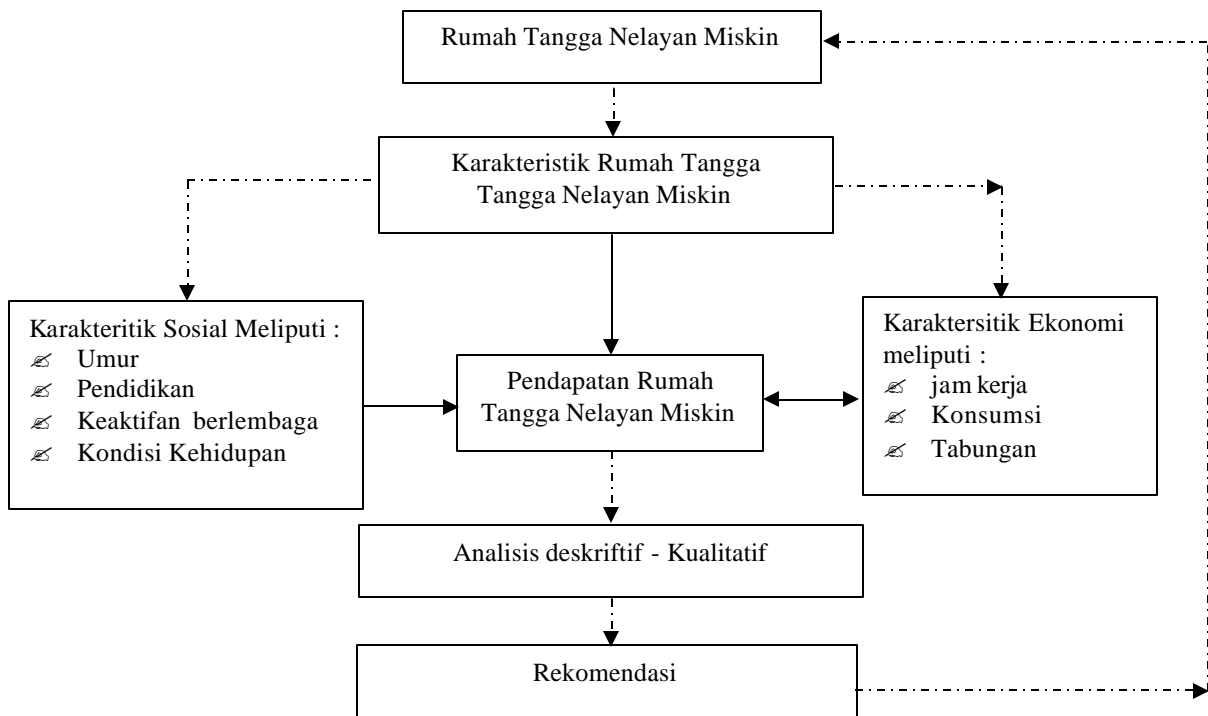
Dari berbagai teori tentang apa dan bagaimana kemiskinan itu, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa definisi, ukuran dan sebab-sebab

kemiskinan itu multi dimensi, sehingga cara untuk menanggulangnya juga harus multi-dimensi, tergantung pada ukuran, definisi, dan sebab-sebab munculnya kemiskinan tersebut.

Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pangkep Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring memiliki penduduk miskin terbesar bila dibandingkan dengan kelurahan lainnya.

Untuk mengetahui hubungan karakteristik sosial ekonomi meliputi: umur, pendidikan, keaktifan berlembaga, kondisi kehidupan, jam kerja, konsumsi, dan tabungan dengan pendapatan rumah tangga nelayan miskin Kelurahan Mattiro Sompe dilakukan penelitian dengan menggunakan metode pengamatan, wawancara, kuisioner, dan interpretasi data dengan tehnik triangulation atau dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

**Gambar 1. Skema Kerangka Pikir**



Keterangan : Garis : —→ Hubungan fungsional  
 Garis : -.-.-→ Hubungan hirarki/kebijakan

## H. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir di atas maka dapat ditarik jawaban sementara untuk permasalahan sebagai berikut :

Diduga bahwa karakteristik sosial dan ekonomi meliputi: umur, pendidikan, keaktifan berlembaga, kondisi kehidupan, jam kerja, konsumsi, dan tabungan mempunyai hubungan yang signifikan dengan pendapatan rumah tangga nelayan miskin di Kelurahan Mattiro Sompe Kecamatan Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep.